

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dikemukakan pada tujuan bernegara pada UUD 1945 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak masalah atau persoalan yang dihadapi untuk mencapainya, pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Aini, et al., 2013).

Sehubungan dengan adanya reformasi, Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang – undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya undang undang tersebut maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan

Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (Harahap, 2020). Perubahan sistem pemerintahan membawa juga perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Poin penting didalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu terkait kewenangan keuangan, dimana pemerintah daerah berhak mengatur dan mendistribusikan uang yang ada (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya serta menggali lebih dalam terkait potensi daerah yang ada agar terciptanya kemandirian didalam implemenetasi pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan kredibel agar dapat menggambarkan secara nyata pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan poin utama diselenggarakannya suatu daerah otonom yang mandiri terutama pada pengelolaan sumber daya salah satunya yaitu sektor keuangan.

Mardiasmo (2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat pengendalian utama bagi pemerintah sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan dan menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, standar evaluasi kinerja, otorisasi pengeluaran untuk masa depan dan alat pengaturan bermacam unit kerja pada seluruh aktivitas kerja. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan mengimplementasikan kebijakan

anggaran, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah dalam memenuhi prioritas, dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan (Assidiqi, 2016).

Halim (2002) dalam Ramadhani (2016), menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu

atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. (Mahsun, 2013).

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang digambarkan melalui akun-akun dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menjadi acuan dan sumber informasi bagi masyarakat serta wakil rakyat yang ada, dalam hal ini DPRD untuk dapat menilai dan mengevaluasi kinerja dari gubernur , bupati atau walikota.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial (Ropa, 2016).

Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pilat dan Morasa, 2017).

Struktur APBD Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun anggaran tahun 2015- 2019. Pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan Daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2015-2019 kendati paket otonomi Daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ketahun, hal ini merupakan kewenangan otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas progam-program pembangunan di daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah

yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri.

Secara garis besar keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan pada tabel 1.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019**

*(Dalam Rupiah)*

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2015	933.668.777.892	882.967.881.922	94,57	1.012.872.216.626	921.730.205.295	91,00
2016	1.046.524.904.888	990.850.500.694	94,68	1.081.745.552.114	1.017.792.838.832	94,09
2017	1.060.502.746.429	1.014.817.095.528	95,69	1.060.438.024.011	967.651.766.130	91,25
2018	1.094.773.542.128	1.099.896.407.343	100,47	1.112.917.035.840	1.046.282.914.606	94,01
2019	1.166.130.657.515	1.157.280.009.284	99,24	1.200.922.154.196	1.119.835.574.427	93,25

**Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi**

Pendapatan Kabupaten Tebo apabila dilihat dari tabel 1.1 di atas meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD tahun 2015, pemerintah daerah masih bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi melalui dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi sebesar 100,35% dari total rencana pendapatan sebesar Rp.933.668.777.892. Pencapaian target pendapatan menunjukkan angka 94,57% dengan realisasi sebesar Rp 882.967.881.922 dari anggaran sebesar Rp 933.668.777.892. Pencapaian target tertinggi berada pada

pendapatan transfer pemerintah provinsi dengan pencapaian sebesar 100,38%, disusul dengan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan pencapaian sebesar 100,35%.

Tahun 2016 peningkatan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya Rp. 1.046.524.904.888. Dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD Tahun 2016, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp. 1.046.524.904.888. Pencapaian target pendapatan 94,68% dengan realisasi Rp.990.850.500.694 dari anggaran sebesar Rp 1.046.524.904.888. Pencapaian target tertinggi berada pada pendapatan transfer dana bagi hasil sumber daya alam dengan pencapaian sebesar 105,81% disusul dengan pendapatan pajak daerah dengan pencapaian sebesar 104,89%.

Tahun 2017 peningkatan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya. Dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD Tahun 2017, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.060.502.746.429. Pencapaian target pendapatan 95,69% dengan realisasi Rp. 1.014.817.095.528 dari anggaran sebesar Rp 1.060.502.746.429. Pencapaian target tertinggi berada pada pendapatan pajak daerah dengan pencapaian sebesar 105,94%.

Tahun 2018 peningkatan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya. Dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD Tahun 2018, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.094.773.542.128. Pencapaian target pendapatan 100,47 % dengan realisasi Rp. 1.099.896.407.343 dari anggaran sebesar Rp 1.094.773.542.128. Pencapaian target tertinggi berada pada dana bagi hasil sumber daya alam dengan pencapaian sebesar 177,92%

Tahun 2019 peningkatan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya Rp. 1.166.130.657.515 sebesar 99,24%. Dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD Tahun 2019, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.166.130.657.515. pencapaian target pendapatan menunjukkan angka 99,24% dengan realisasi sebesar Rp1.157.280.009.284,13 dari anggaran sebesar Rp1.166.130.657.515,69. Pencapaian target tertinggi berada pada pendapatan pajak daerah dengan pencapaian sebesar 131,01%.

Dapat disimpulkan dari Tabel Pendapatan pada tahun 2015-2019 bahwa dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah

Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Atas kondisi tersebut, upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tetap terus ditingkatkan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek Pajak/Retribusi Daerah yang potensial tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat berpengaruh negatif pada melemahnya kinerja keuangan dunia usaha. Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing lebih diutamakan guna mendorong dunia usaha agar dapat lebih berkembang sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

Tabel 1.1 diatas juga menunjukkan informasi anggaran belanja dan realiasi belanja Kabupaten Tebo yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 anggaran belanja Kabupaten Tebo mengalami Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp50.972.325.002,54 atau sebesar 11,52%, Hibah naik menjadi sebesar Rp4.498.183.994,00 atau sebesar 31,78%, Bantuan Sosial juga naik sebesar Rp2.101.940.659,00 atau sebesar 51,84%.

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2016 naik sebesar Rp68.873.335.487,18 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2015. Kenaikan secara umum karena adanya kenaikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja Hibah sebesar Rp27.446.400.169,00 atau naik sebesar 193,85%. Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Pegawai sebesar

Rp31.224.457.269,18 atau sebesar 7,06%. Hibah naik menjadi sebesar Rp27.446.400.169,00 atau sebesar 193,85%, sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 tidak dianggarkan. Anggaran Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp262.650.991.399,00 atau turun sebesar Rp36.997.671.287,00 atau sebesar 12,35% dari anggaran tahun 2015.

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2017 turun sebesar Rp45.787.660.174,89 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2016. Penurunan secara umum karena adanya penurunan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja barang sebesar Rp45.678.255.094,00 atau naik sebesar 28,43%. Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Barang sebesar Rp45.678.255.094,00 atau sebesar 28,43%. Belanja Subsidi naik menjadi sebesar Rp1.204.410.039,00 atau sebesar 25,68%, sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan. Anggaran Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp280.901.513.152,00 atau naik sebesar Rp18.250.521.753,00 atau sebesar 6,95% dari anggaran tahun 2016.

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2018 naik sebesar Rp52.479.011.829,40 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2017. Kenaikan secara umum karena adanya kenaikan untuk Belanja Barang dan Belanja Hibah. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja barang sebesar Rp50.794.593.257,08 atau naik sebesar 24,62%. Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Barang sebesar Rp50.794.593.257,08

atau naik sebesar 24,62%, sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada TA 2018 tidak dianggarkan. Anggaran Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp280.008.655.876,00 atau turun sebesar Rp892.857.276,00 atau sebesar 0,32% dari TA 2017.

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2019 naik sebesar Rp88.005.118.356,04 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2018. Kenaikan secara umum karena adanya kenaikan untuk Belanja Barang dan Belanja Hibah. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja Hibah sebesar Rp1.721.787.000,00 atau naik sebesar 12,56%. Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp32.410.919.660,51 atau naik sebesar 8,23%, sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada TA 2019 tidak dianggarkan. Anggaran Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp295.188.776.465,76, naik sebesar Rp15.180.120.589,76 atau sebesar 5,42% dari TA 2018.

Tabel 1.2 berikut ini menunjukkan Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo :

**Tabel 1.2**  
**Tabel Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>%</b>	<b>Belanja</b>	<b>%</b>
2015	882.967.881.922	-	921.730.205.295	-
2016	990.850.500.694	12,22	1.017.792.838.832	10,42
2017	1.014.817.095.528	2,42	967.651.766.130	-4,92
2018	1.099.896.407.343	8,38	1.046.282.914.606	8,12
2019	1.157.280.009.284	5,22	1.119.835.574.427	7,03
Rata-rata	1.029.162.378.954	7,06	921.730.205.295	5,16

**Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi**

Pendapatan Kabupaten Tebo apabila dilihat dari tabel 1.2 di atas, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar 12,22%. Pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,42%. Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,22%.

Tabel 1.2 di atas juga menunjukkan informasi bahwa pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2016 realisasi belanja naik yaitu sebesar 10,42%. Pada tahun 2017 realisasi belanja menurun sebesar -4,92%. Pada tahun 2018 realisasi belanja terjadi pertumbuhan yaitu sebesar 8,12%. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan yaitu sebesar 7,03%.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Ropa (2016) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, dan juga melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan penelitian dengan penelitian yang dirujuk. Pertama, penelitian Ropa (2016) dilakukan dengan berbagai rasio, diantaranya rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Sedangkan penelitian ini menggunakan Model Brown (1993, 1996) berdasarkan Ritonga (2014) yang menjelaskan bahwa model ini memperkenalkan 10 rasio kunci untuk mengukur kondisi keuangan Pemda, alasan memilih Brown adalah kemampuannya untuk mengevaluasi kondisi keuangan pemda hanya dengan lima indikator dan penggunaan data acuan (*benchmark*).

Umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintahan pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan , karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan bisa lebih luas dan meningkat. Demikian juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang menaik maka kinerja juga akan menaik atau selaras dengan kenaikan itu.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mengukur potensi yang dimiliki daerah dan seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber ekonomi, untuk mengetahui konsisi keuangan daerah, mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat analisis untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Terdapat beberapa jenis analisis rasio keuangan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dikembangkan berdasarkan data dan informasi keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Peneliti tertarik menggunakan Model Brown yang diperkenalkan oleh Ritonga dengan rasio 10 poin.

Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi yang menjalankan kewajiban otonomi daerah serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai keberhasilann dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Tebo sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran. Dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang diterapkan dan dilaksanakan maka dapat diperoleh informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tebo.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai penambah wawasan peneliti mengenai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015-2019. Tahun 2015 – 2019.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Dalam hal ini Bagian Keuangan Kabupaten Tebo diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai

dengan visi dan misi Kabupaten Tebo yakni Terwujudnya Kabupaten Tebo Tentram, Unggul, Nyaman, Makmur, Tertib, Adil dan Sejahtera.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.